TELISIK FAKTA

Perhutani Banyuwangi Barat Ikuti Rakor Perlindungan Hutan Provinsi Jawa Timur

Salsa - SURABAYA.TELISIKFAKTA.COM

Nov 28, 2025 - 16:43



Banyuwangi Barat – Perum Perhutani KPH Banyuwangi Barat mengikuti kegiatan Rapat Kordinasi (Rakor) Perlindungan Hutan Provinsi Jawa Timur tahun 2025 dengan tema "Kolaborasi Untuk Lestarinya Hutan Jawa Timur" yang diselenggarakan di kantor Dinas Kehutanan Provinsi (Dishut Prov) Jawa Timur jalan By Pass Nomor 5 Manyar, Sedati Agung, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, pada Kamis (27/11/2025).

Rakor yang diinisiasi oleh Dishut Prov Jatim ini dihadiri juga oleh Perhutani Divre

Jatim, segenap Administratur KKKPH se Divre Jatim, Pabin Polhut Polresta Banyuwangi, Balai Taman Nasional se Jatim, Balai PS Yogjakarta, dan dalam kesempatan tersebut Kepala Dishut Prov Jatim, Dr.Ir.Jumadi, M.MT memberikan arahan bahwa tata kelola hutan baik itu KHDPK, kelola Perhutani dan kelola yang lain punya satu tujuan yaitu menjadikan pengelolaan hutan lestari.

Kepala Perhutani (Administratur) KPH Banyuwangi Barat, Muklisin mengatakan pihaknya sangat mendukung tentang upaya Pemerintah dalam hal ini Dishut Prov Jatim dalam hal perlindungan hutan.

"Perum Perhutani KPH Banyuwangi Barat kawasan hutannya termasuk aman dan berdasarkan data Penebangan Pohon Tanpa Ijin (PPTI) dalam bulan Oktober adalah Nihil, realisasi sampai dengan Oktober 2025 sebanyak 3 pohon," terang Muklisin.

"Kunci sukses dalam perlindungan hutan dari gangguan keamanan hutan (gukamhut) dimana kita lakukan upaya preventif persuasif dengan melakukan patroli yang humanis dengan melibatkan masyarakat seperti Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), sinergitas dengan multi stake holder mulai Forkompimda, Forkompincam, Pemerhati Lingkungan dan Lembaga Swadaya Masyarakat," tegasnya.

Pabin Polhut Polresta, AKP Donny Ariyadi, S.H mengatakan bahwa Polri menjalin kerja sama strategis dengan Perum Perhutani untuk mengoptimalkan perlindungan hutan sesuai dengan semangat program transformasi institusi Kepolisian yaitu POLRI PRESISI akronim dari prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.

"Program ini berfokus pada transformasi organisasi, operasional, pelayanan publik, dan pengawasan dengan tujuan menjadi polisi yang lebih prediktif, bertanggung jawab, transparan, dan berkeadilan," ujar AKP Donny.

"Kami siap setiap saat bersama Perhutani KPH Banyuwangi Raya dalam upaya perlindungan hutan mulai dari preventif persuasif sampai dengan penegakan hukum (represiv) bila diperlukan, agar terjaga kelestarian alam dan eksistensi hutan negara," ungkapnya.@Red.